

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Fenomena penjarahan di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru. Dalam sejarah sebelumnya, penjarahan biasanya dilakukan ketika krisis sedang terjadi, baik karena bencana alam, konflik politik, ataupun kerusuhan dan perang. Penjarahan juga dilakukan secara berkelompok atau massal maka dari itu membuat orang sekitarnya ingin melakukan hal yang serupa. Penjarahan tidak dilakukan secara diam-diam seperti pencurian pada umumnya, penjarahan dapat dilakukan secara terang-terangan dan terbuka.



Gambar 1.1 Tragedi Penjarahan Mei 1998

Sumber : DW (2016)

Pada gambar 1.1 merupakan salah satu contoh nyata terjadinya penjarahan di Indonesia. Sejarah penjarahan ini menjadi sejarah yang kelam bagi Indonesia. Saat itu penjarahan dilakukan akibat dari krisis moneter yang dialami Indonesia. Rakyat meminta perubahan dan reformasi dari Presiden Soeharto yang telah menjabat selama 32 tahun. Masyarakat menilai bahwa Kekuasaan Presiden Soeharto yang terlalu lama membuat adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). (DW, 2016)

Tragedi Mei 1998 ini dapat terbilang sebagai salah satu yang terbesar di Indonesia, Dilansir dari Kompas.com dalam 2 hari saja pada 13-14 Mei 1998 kerugian dalam bentuk materi di Jakarta sekitar 2,5 Triliun Rupiah. Kerugian tersebut meliputi kerusakan 13 pasar, 2.479 ruko, 40 mal/plaza, 1.604 toko, 45 bengkel, 2 kecamatan, 11 polsek, 383 kantor swasta, 65 kantor bank, 24 restoran, 12 hotel, 9 pom bensin, 8 bus kota dan metromini, 1.119 mobil, 821 sepeda motor, 486 rambu-rambu lalu lintas, 11 taman, 18 pagar, serta 1.026 rumah residensial dan gereja. Di samping itu, jumlah korban yang meninggal di DKI Jakarta tercatat sebanyak 288 orang dan terdapat 101 individu yang mengalami luka.



Gambar 1.2 Kaum Tionghoa korban kerusakan Mei 1998

Sumber : BBC Indonesia (2024)

Indonesia memiliki sejarah yang kelam mengenai suku keturunan etnis Tionghoa, mereka menjadi korban sasaran untuk kerusakan 1998 mulai dari penjarahan, pembakaran rumah, hingga kekerasan kepada perempuan etnis Tionghoa. Tempat yang disasar seperti Jakarta daerah Glodok dan Gajah Mada, kota Solo, dan kota Medan. Hal ini memicu kaum Tionghoa yang ada di Indonesia kabur ke luar negeri untuk alasan keamanan. Mereka membawa ketakutan dan pengalaman tersebut hingga hari ini, walaupun tidak pernah merasakannya secara langsung cerita tentang peristiwa tersebut menjadi isu yang diingat oleh etnis Tionghoa di Indonesia. Mereka memiliki trauma psikologis tersendiri, terutama yang merasakan langsung peristiwa tersebut.

Bagi Generasi Z keturunan Tionghoa walaupun tidak langsung merasakan kejadian yang terjadi pada 1998 tersebut, mereka tetap tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai kejadian tersebut, dan menyelami pengalaman warga Tionghoa. Mereka mengaku bahwa trauma tentang peristiwa Mei 1998 tetap diwariskan dan membentuk kehati-hatian dalam bersikap dan bergaul. Semenjak kejadian itu di kalangan warga Tionghoa terdapat pesan untuk *stay low* atau tidak membuat keributan. Terdapat kecenderungan juga untuk mengirim anak ke sekolahnya yang didominasi oleh etnis Tionghoa bahkan bentuk rumah dan bangunan pun dibuat dengan tembok dan pagar yang tinggi serta teralis karena alasan keamanan. Tidak hanya itu, hal seperti tidak menggunakan angkutan umum pun dilakukan untuk “*safety measure*”. Semua ini merupakan contoh-contoh dari Generasi Z yang walaupun tidak merasakan langsung peristiwa 1998 namun tetap diwariskan untuk tetap berjaga dan tetap berhati-hati sebagai etnis minoritas. Trauma memori kolektif ini dianggap tidak mudah untuk dilupakan dan tetap dilanjutkan dari generasi ke generasi. (BBC News Indonesia, 2026)



Gambar 1.3 Tragedi Penjarahan Pasca Gempa Palu 2018

Sumber : CNN Indonesia (2018)

Pada gambar 1.3 dapat dibuktikan bahwa penjarahan tidak hanya dalam situasi politik, penjarahan dapat dilakukan dalam berbagai macam krisis yang terjadi. Pada gambar diatas penjarahan dilakukan akibat krisis dari bencana

alam. Walaupun dari segi kemanusiaan penjarahan terlihat seperti membantu rakyat yang terkena bencana alam namun perilaku tersebut secara hukum tetap salah. Aturan tersebut tertulis di pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. (Budiarti, 2025) .Penjarahan yang terjadi di Palu juga tidak semua berfokus kepada barang-barang pokok untuk bertahan hidup, contohnya pada gambar 1.3 toko yang dijarah merupakan toko Handphone dalam notabene tidak termasuk dalam kebutuhan primer manusia. (CNN Indonesia, 2018)

Kriminalitas termasuk penjarahan dapat dilakukan karena adanya orang yang termotivasi, contohnya ingin mengubah status sosial, kemudian memiliki target yang layak seperti rumah orang kaya atau toko yang menjual barang-barang berharga, dan tidak adanya penjagaan yang efektif dari pihak berwajib. (Cohen & Felson, 1979) seperti dikutip dalam jurnal (Robby Herlian Soetarjo, 2022)

Secara umum ada beberapa alasan mengapa orang dapat melakukan penjarahan seperti kesempatan dalam situasi *chaos* dimana saat situasi kacau norma hukum melemah maka orang melihat kesempatan dalam ketidakpastian tersebut, faktor ekonomi dan kesenjangan sosial termasuk pemikiran bahwa masyarakat miskin boleh mengambil dari masyarakat kaya, psikologi massa dimana saat berada dalam kerumunan besar orang menjadi kehilangan rasa takut karena tindakan yang salah akan ditanggung bersama-sama, Dorongan emosi ketika masyarakat mengalami ketidakpuasan dengan pemerintah, ketika bencana alam membuat masyarakat mengalami tekanan sosial maka harus menjarah untuk bertahan hidup dan rasa solidaritas bahwa ketika satu individu menjarah maka timbul rasa keikutsertaan untuk menjarah juga, terakhir individu dapat melakukan penjarahan saat mendapatkan *framing media* contohnya ketika media sosial, rumor, atau pemberitaan lainnya melakukan narasi “Pejabat kaya vs masyarakat miskin” maka akan ada pikiran dalam masyarakat bahwa penjarahan yang dilakukan sebenarnya sah dan adil. (Antara News, 2025)

Disaat masih banyak masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan ekonomi atau finansial, ada isu bahwa gaji DPR RI dapat naik hingga Rp3 Juta

per hari. Isu dimulai ketika anggota komisi I DPR TB Hasanuddin menyebut anggota dewan per bulan bisa menerima pendapatan hingga Rp100 juta. Ia mengatakan bahwa jumlah tersebut adalah pendapatan bersih atau take home pay. Kabar tersebut semakin ramai ketika wakil ketua DPR RI Adies Kadir menyebutkan adanya tunjangan rumah sebesar Rp50 Juta dan kenaikan tunjangan-tunjangan lainnya seperti tunjangan beras dari Rp10 Juta menjadi Rp12 Juta, tunjangan bensin dari Rp5 Juta menjadi Rp7 Juta. (CNN Indonesia, 2025)



Negara	Gaji & Tunjangan	Rata-Rata UMR	Rasio Gaji
 Indonesia	Rp 104 juta	Rp 3,7 juta	27x
 Amerika Serikat	Rp 232 juta	Rp 64 juta	3,6x
 Jerman	Rp 176 juta	Rp 72 juta	2,4x
 Singapura	Rp 208 juta	Rp 55 juta	3,7x
 Malaysia	Rp 67,2 juta	Rp 6,4 juta	10,5x
 Filipina	Rp 32 juta	Rp 5,6 juta	5,7x
 Australia	Rp 239 juta	Rp 98,7 juta	2,8x

Sumber: presidenri.go.id, Kompas.id, & diolah dari berbagai sumber

Gambar 1.4 Perbandingan gaji DPR dan UMR Indonesia

Sumber : Kompas.com (2025)

Pada gambar diatas dijelaskan bahwa gaji seorang DPR lebih besar 27 kali lipat dibandingkan gaji minimum pekerja di Indonesia. Bahkan Malaysia yang terbilang sudah cukup besar di rasio 10 kali lipat tetap kalah dari Indonesia. Kesenjangan sosial tersebut sangat terlihat disaat wakil rakyat memiliki hidup identik dengan kemewahan, mapan, dan berkecukupan. Diluar dari pemerintahan masih banyak masyarakat yang sulit untuk mencari pekerjaan bahkan sesuap nasi untuk bertahan hidup. Akhirnya timbul respons emosi dari kesenjangan sosial yang terjadi, rakyat melakukan protes dan demo akan kenaikan gaji tersebut. (Kompas.com, 2025)

Dari sini banyak media yang meliput mengenai gaji DPR RI yang kontroversial tersebut, masyarakat menilai bahwa pekerjaan DPR RI yang tidak sebanding dengan kenaikan gaji yang diberikan. Perihal kenaikan gaji DPR RI ini kemudian ramai di media sosial dan menjadi bahan perbincangan bagi semua orang.



Gambar 1.5 Survei tingkat kepercayaan masyarakat akan pemerintah

Sumber : CSIS (2023)

Menurut survei yang pernah dilakukan oleh CSIS yang dikutip oleh (Putri, 2023) lembaga DPR memiliki tingkat kepercayaan urutan terbawah, dimana berarti masyarakat memiliki kepercayaan paling rendah kepada DPR RI. Dapat dilihat bahwa sejak tahun 2023 akhir masyarakat sudah meragukan lembaga DPR RI. Sekarang masyarakat mudah untuk melihat kondisi dari DPR, media sosial seringkali menunjukkan bagaimana sikap dari wakil rakyat tersebut. Contohnya, banyak anggota DPR yang melakukan korupsi membuat masyarakat mengingat lebih banyak negatif dari DPR dibandingkan perbuatan positif. Hal-hal seperti tidur saat sidang juga membuat masyarakat geram dan kesal karena masyarakat merasa mereka telah memilih wakil rakyat tersebut untuk menyampaikan aspirasi dari rakyat untuk pemerintah namun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh DPR dianggap tidak pro rakyat.



Gambar 1. 6 Seruan ramai di sosial media

Sumber : Kompas.com (2025)

Gambar diatas menunjukkan ketika masyarakat sudah mulai geram terhadap aksi pemerintah yang seolah tidak berpihak kepada pemerintah. Pada akhirnya mulai perencanaan untuk seruan demo besar-besaran terjadi untuk membubarkan DPR RI. Masyarakat bersatu untuk melakukan protes terhadap pemerintah, demo dimulai dari tanggal 25 Agustus 2025 di halaman gedung DPR RI.



Gambar 1.7 Demonstrasi 25 Agustus 2025 yang terjadi di depan DPR RI

Sumber : Tempo.com (2025)

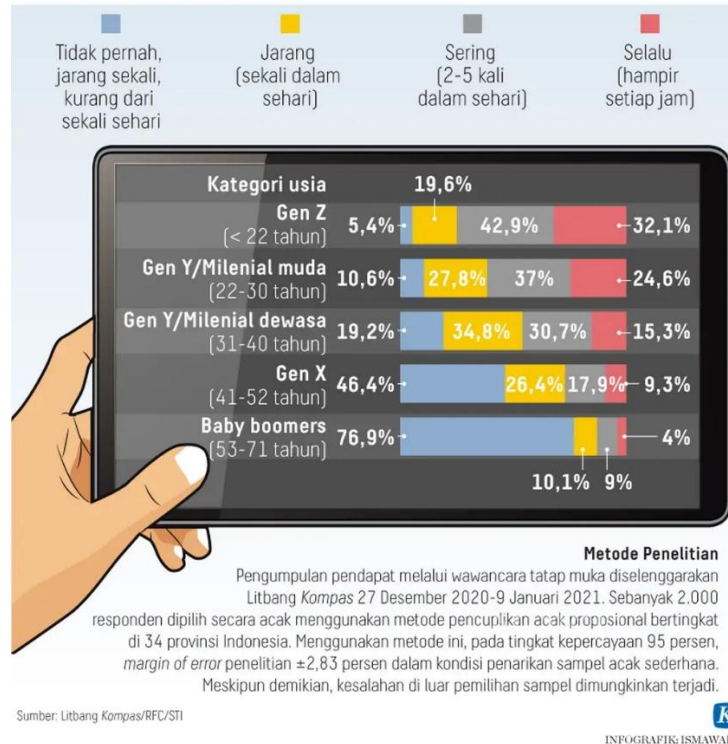


Gambar 1.8 Survei data mengenai aplikasi favorit yang digunakan oleh Generasi Z dan Milenial

Sumber : Databoks (2024)

Menurut survei yang pernah dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam artikel (Ahdiat, 2024) menyebutkan bahwa generasi Z memiliki perbedaan yang cukup besar dengan generasi milenial dalam aplikasi Instagram dan TikTok. Aplikasi TikTok pada saat terjadinya penjarahan menjadi sarana untuk menyebarkan kejadian tersebut sehingga generasi Z dapat dikatakan sebagai generasi yang paling banyak melihat dan mengalami informasi media sosial tersebut. Aplikasi Instagram juga menjadi media bagi jurnalis-jurnalis independen untuk membantu memberitakan mengenai kejadian penjarahan tersebut, dengan demikian generasi Z dapat dikatakan hampir seluruhnya terpapar dengan informasi dari media sosial Instagram dan TikTok. Bahkan aplikasi-aplikasi tersebut sudah sangat tidak asing bagi para generasi Z bahkan hampir semua generasi Z mempunyai aplikasi-aplikasi seperti TikTok dan Instagram.

Seberapa sering Anda mengakses/membuka/membaca media sosial (Instagram, Facebook, Twitter) di ponsel dalam sehari?



Gambar 1.9 Survei mengenai tingkat keserangan setiap generasi dalam menggunakan aplikasi sosial media

Sumber : Kompas.id (2021)

Dalam survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam artikel yang terbit oleh (Kompas.id, 2021) dapat terlihat bahwa generasi Z merupakan generasi yang paling dekat dengan dunia media sosial, bahkan persentase dalam generasi ini untuk tidak membuka sosial media per hari sangat kecil di angka 5% saja. Dengan demikian generasi Z merupakan generasi yang paling banyak terpapar informasi-informasi di media sosial baik secara pasif maupun aktif. Media sosial tidak hanya sebagai sarana hiburan bagi para generasi Z namun media sosial telah menjadi sarana kehidupan sehari-hari, berbeda dengan generasi sebelumnya yang melihat TV berita sebagai sumber informasi, generasi Z ini menjadikan media sosial sebagai bagian dalam kehidupan sehari-hari.

Teknologi digital sendiri di dunia modern ini membuat individu semakin mudah untuk menyerap dan membagikan informasi, setiap manusia dapat mengutarakan pendapatnya masing-masing di media sosial, namun menurut Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay dalam artikel (Kompas.id, 2023) kebebasan ini juga dapat membuat media sosial menjadi alat untuk mempercepat penyebaran informasi palsu serta ujaran kebencian. Dengan ini semakin banyak arus-arus pendapat baik yang benar ataupun palsu di media sosial, masyarakat umum diminta untuk secara tidak langsung lebih bijak dalam melakukan literasi media.



Gambar 1.10 Foto wakil ketua komisi III Ahmad Sahroni

Sumber : Fraksi Nasdem (2025)

Politikus dari Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, lahir pada tanggal 8 Agustus 1977 di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sederhana. Ibunya bernama Hernawaty, yang bekerja sebagai penjual nasi padang di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. Sahroni akrab dipanggil Roni oleh para pendukungnya. Roni pertama kali berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode 2014-2019 mewakili Dapil DKI Jakarta III, mendapat 60.683 suara. Dia lalu terpilih kembali sebagai anggota Dewan untuk periode 2019-2024 pada Pemilu 2019 dari dapil yang sama.. (Fraksi Nasdem, 2025)



Gambar 1.11 Kekayaan Ahmad Sahroni dengan mobil mewah

Sumber : Harian Haluan.com (2022)

Setelah isu mengenai pembubaran DPR terdengar oleh Ahmad Sahroni, lalu Ahmad Sahroni menyatakan sesuatu yang sangat kontroversial dan membuat sakit hati masyarakat. Pada 22 Agustus 2025 Ahmad Sahroni wakil ketua komisi III DPR mengatakan bahwa “orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia,” Masyarakat yang membesarkan namanya langsung tidak terima dengan pernyataan kontroversial tersebut dan namanya seketika itu langsung menjadi negatif. Rakyat menilai bahwa kekuasaan politik telah membuat Ahmad Sahroni angkuh dan jauh dari tujuan utama sebagai DPR yaitu sebagai wakil rakyat. (Tim detikNews, 2025)

Sebelumnya Ahmad Sahroni dikenal sebagai orang yang sukses dibidang bisnis, bahkan dijuluki sebagai “Sultan Priok”. Tidak hanya itu Ahmad Sahroni dikaitkan dengan karakter film fiksi yang sukses seperti “Tony Stark Indonesia” karena kecintaannya akan teknologi dan dunia otomotif. Bahkan orang yang lahir di Priok Jakarta Utara tersebut pernah dirumorkan untuk maju menjadi Gubernur Jakarta yang selanjutnya.

Puncak kemarahan rakyat terjadi pada tanggal 30 Agustus 2025 ketika masyarakat memilih untuk merusak kediaman dari Ahmad Sahroni di daerah Priok, Jakarta Utara. Perusakan dan Penjarahan dilakukan secara langsung *live* melalui aplikasi TikTok. Hal tersebut sangat ramai dalam media sosial dan hampir semua orang Indonesia mengetahui kejadian tersebut. Banyak orang yang mendukung kejadian tersebut namun ada juga yang melihat fenomena tersebut sudah diluar batas dan meminta untuk dihentikan.



Gambar 1.12 Kondisi Rumah Ahmad Sahroni di Priok Jakarta Utara saat dijarah

Sumber : Hukamanews.com (2025)

Berbagai hal di dalam rumah Ahmad Sahroni diperlihatkan ke media, mulai dari isi rumah ada mobil-mobil mewah, koleksi patung *action figure*, jam tangan mewah, hingga surat tanah dan surat ijazah pribadi Ahmad Sahroni pada saat itu sedang tidak berada di rumah, wakil ketua komisi III tersebut hanya melihat rumahnya dijarah oleh warga. Alasan utama masyarakat melakukan penjarahan dan perusakan ini terkumpul dari berbagai macam alasan, mulai dari kemarahan akan omongan dari Ahmad Sahroni, Perasaan akan kesenjangan sosial, ataupun individu yang memang terpengaruh lingkungan untuk turut serta dalam penjarahan tersebut. Banyak individu juga yang memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan pribadinya seperti mengambil barang yang ada dalam rumah tersebut.



Gambar 1.13 kondisi live sosial media ketika penjarahan rumah Ahmad Sahroni

Sumber: TikTok (2025)

Selama masa *streaming live* berlangsung, dapat terlihat bahwa mayoritas dari netizen yang menonton penjarahan tersebut setuju dengan tindakan yang dilakukan dalam masyarakat di video yaitu menjarah rumah pribadi Ahmad Sahroni. Respon dari masyarakat terhadap penjarahan sebagian besar positif dan mendukung penjarahan ini terjadi. Berbagai perkataan yang provokatif juga dituangkan oleh netizen seperti “Jarah anggota DPR yang lainnya”. Mereka merasa puas dengan tindakan yang dilakukan seolah setimpal dengan perkataan yang sebelumnya sudah dilayangkan oleh Ahmad Sahroni. Bahkan *Content Creator* yang meliput peristiwa tersebut banyak diberikan *gift-gift* oleh masyarakat netizen membuat mereka semakin semangat untuk meliput kejadian tersebut.



Gambar 1.14 bentuk dukungan penjarahan Ahmad Sahroni di media sosial

Sumber: TikTok (2025)

Dapat dilihat dari gambar 1.14 bahwa mayoritas netizen di sosial media Tiktok saat itu cukup ramai, hal itu bisa dibuktikan dengan banyaknya aktivitas di *post* tersebut seperti like yang mencapai 1,5 juta, komentar yang berisi hampir 34 ribu, *post* disimpan hingga 77 ribu orang, dan *post* tersebut di share hingga 285 ribu kali. Konten di TikTok tentu saja tidak selalu ramai seperti ini, ini karena netizen tertarik dengan berita fenomena mengenai penjarahan Ahmad Sahroni. Besarnya perhatian masyarakat di media sosial menunjukkan bahwa peristiwa penjarahan rumah Ahmad Sahroni bukan sekadar peristiwa kriminal, melainkan telah berkembang menjadi fenomena komunikasi yang memunculkan beragam respons, interpretasi, serta perdebatan di ruang publik digital.



Gambar 1.15 komentar dukungan positif terhadap penjarahan Ahmad Sahroni

Sumber: TikTok (2025)

Tingginya jumlah *like* pada komentar-komentar tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap opini tersebut tidak hanya berasal dari individu yang menuliskan komentar, tetapi juga memperoleh persetujuan dari puluhan ribu pengguna lainnya. Dengan demikian, data ini menjadi salah satu bukti empiris bahwa pada unggahan tersebut terdapat kecenderungan dominan dari netizen untuk memberikan legitimasi atau dukungan terhadap tindakan penjarahan yang terjadi. Temuan ini memperkuat alasan penelitian dalam mengkaji bagaimana Generasi Z memaknai dukungan netizen di media sosial terhadap peristiwa penjarahan Ahmad Sahroni, karena fenomena tersebut memang nyata terlihat melalui interaksi yang terjadi di ruang digital, bukan semata-mata berdasarkan asumsi peneliti.

Peneliti memilih teori analisis resepsi karena melihat berbagai tanggapan dari masyarakat mengenai rumah seorang anggota DPR yang dijarah. Peneliti merasa banyak opini yang berbeda mengenai rumah tersebut dijarah, ada individu yang mendukung, ada individu yang menolak kejadian tersebut dan ada juga individu yang netral dan tidak mendukung ataupun menolak. Peneliti ingin melihat bagaimana ucapan dari Ahmad Sahroni menimbulkan suatu

tindakan atau perbuatan yang berujung pada penjarahan. Peneliti juga ingin melihat berbagai keberagaman yang terjadi di media sosial pada saat penjarahan itu dilakukan.

Peneliti merasa metode kualitatif lebih tepat digunakan karena peneliti ingin menemukan berbagai makna dari reaksi individu terhadap penjarahan tersebut. Diperlukan wawancara mendalam terhadap individu agar mengetahui bagaimana perasaan dan persetujuan dari aksi penjarahan tersebut. Alih-alih mencari kuantitas mengenai setuju atau tidak setuju dari banyaknya individu, peneliti ingin mengetahui jika responden mengapa dan alasan apa menyetujui tindakan tersebut dan mengapa dan alasan apa tidak setuju dengan tindakan penjarahan tersebut.

Tabel 1. 1 Timeline kejadian Ahmad Sahroni

1	22 Agustus 2025	Pernyataan kontroversial di Polda Sumut
2	28 Agustus 2025	Demo besar dan kematian ojek online
3	30 Agustus 2025	Rumah pribadi di Tanjung Priok dijarah

Sumber: Olahan peneliti (2025)

1.2 Rumusan Masalah

Peristiwa penjarahan rumah Ahmad Sahroni memunculkan narasi dukungan, penolakan, dan pembenaran di media sosial. Dalam konteks tersebut, penting untuk memahami bagaimana Generasi Z keturunan Tionghoa memaknai narasi dukungan atas penjarahan, terutama karena kelompok ini memiliki memori sosial terkait penjarahan dan kekerasan terhadap etnis Tionghoa pada 1998.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Generasi Z keturunan Tionghoa memaknai narasi dukungan terhadap penjarahan rumah Ahmad Sahroni di media sosial?
2. Bagaimana posisi resepsi informan dalam kerangka dominant, negotiated, dan oppositional reading Stuart Hall?

1.4 Tujuan Penelitian

- Untuk memahami bagaimana Generasi Z keturunan Tionghoa memaknai narasi dukungan terhadap penjarahan rumah Ahmad Sahroni di media sosial.
- Untuk mengetahui posisi resepsi dari para informan Generasi Z keturunan Tionghoa terhadap narasi dukungan penjarahan rumah Ahmad Sahroni.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian komunikasi massa khususnya dalam analisis resepsi khalayak, terutama dalam hubungan komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Penelitian ini berfokus kepada teori analisis resepsi dimana melihat bagaimana berbagai macam individu menanggapi suatu kejadian, dalam konteks perilaku dan cara bicara seorang anggota DPR yaitu Ahmad Sahroni. Peneliti juga menggunakan analisis menggunakan metode kualitatif, yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan panduan bagi peneliti selanjutnya mengenai komunikasi politik antara lembaga legislatif dengan masyarakat melalui peristiwa yang kontroversial tersebut. Penelitian juga dapat dijadikan referensi akademis untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai dinamika resepsi publik terhadap isu-isu politik di Indonesia.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu individu ataupun media dalam menyusun framing yang benar terutama dalam hal-hal sensitif terhadap konteks sosial-politik di masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi tokoh dan pejabat publik dalam berkomunikasi dengan khalayak umum atau rakyat. Peneliti berharap dapat berkontribusi bagi masyarakat untuk lebih menyaring dan mengolah informasi yang beredar mengenai isu-isu sosial politik di Indonesia agar tindakan yang berakibat

negatif untuk masyarakat dapat dicegah dan disalurkan ke tindakan-tindakan yang bersifat membangun dan positif.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperlihatkan perspektif masyarakat dalam memilih tindakan mengenai insiden salah satu anggota DPR RI. Narasi dukungan penjarahan yang terjadi saat ini dianggap sebagai bentuk “komunikasi” dari masyarakat kepada pemerintah bahwa suara rakyat lebih besar dari suara pemerintah. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuat individu yang jabatannya lebih besar atau lebih tinggi terutama pihak-pihak pemerintah untuk lebih bijak dalam pemilihan kata-kata kepada rakyat, karena dapat menimbulkan resepsi sosial yang berbeda-beda antar individu.

1.5.4 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang dapat mempengaruhi batas hasil dan ruang lingkup hasil kajian. Narasi dukungan penjarahan terhadap anggota DPR RI dapat dikatakan merupakan fenomena yang cukup baru, sebagai bentuk protes atau demo terhadap pemerintah karena dianggap cara lama tidak dihirau atau didengarkan lagi, maka hasil yang diperoleh tidak dapat diterapkan pada subjek yang lain seperti anggota DPR lainnya, ataupun petugas-petugas negara yang lain. Penelitian ini hanya berfokus kepada tindakan satu individu dari penyebab terjadi kejadian, sewaktu kejadian dan pasca kejadian yaitu Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni sehingga fenomena yang terjadi kepada petugas negara yang lain belum tentu memiliki hasil dan data yang sama. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif sehingga menimbulkan fokus terhadap beberapa individu yang mendalam untuk mengerti pendapat dari audiens bukan pendapat umum dari sekelompok individu. Peneliti juga mengakui bahwa peneliti mempunyai keterbatasan dalam informan yang terlalu homogen.